

# EKONOMI NEOKLASIKAL: COMPETITIVE ECONOMICS

(Dikutip dari Buku Membangun Koperasi Indonesia, Oleh : Sri Edi Swasono, 2010 )

Para dosen ilmu ekonomi ( mestinya harus senantiasa ingat bahwa mereka telah mengajarkan ilmu ekonomi berdasar buku teks induk Economics yang ditulis oleh Prof. Paul A. Samuelson (yang pada tahun 1970 memperoleh hadiah Nobel Ekonomi). Tentulah bukunya ini berideologi fundamentalisme pasar. Edisi pertama buku ini ditulis pada tahun 1948 dan edisi kedelapanbelas (terakhir) pada tahun 2005.

Buku-buku induk mengenai *comparative economic systems* yang ditulis oleh dua tokoh besar mengenai bidang ini seperti Morris Bornstein (1994), Paul Gregory & Robert Stuart (1985) belum ada satu istilah pun *globalization* dan *neoliberalism* dicantumkan. (Dapat dimengerti bila beberapa akademisi senior yang juga *market fundamentalist* dengan sikap *coquettish* mengatakan "apa itu neoliberalisme, tidak ada dalam buku-buku teks"). Istilah neoliberalisme lebih predatorik sesuai brutalitas globalisasi ekonomi terhadap negara-negara lemah-ekonomi. Ada yang mencoba (*nastily*) membela neoliberalisme dari segi istilah, bahwa *neo* diartikannya sebagai semi,<sup>1</sup> sehingga berarti tidak benar-benar atau hanya agak liberal. Istilah *semi* dikacaukannya dengan istilah *quasi*. Neoliberalisme adalah penjajahan baru bagi perekonomian Indonesia. Menolak neoliberalisme merupakan panggilan patriotic. Taat pada prinsip, taat pada doktrin nasional, tegas dan teguh menjunjung paham nasionalisme akan tergantung pada keberhasilan pendidikan dan pengajaran nasional menyelenggarakan *character building*.

Namun kepada para mahasiswa, saya menjelaskan bahwa pasar tidak hanya sekedar suatu *locus* atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi pasar adalah suatu kekuatan besar yang saya sebut sebagai *the global financial tycoons* (atau *taoke-taoke* finansial global), yaitu raja-raja penguasa modal global dengan kekuasaan ekonomi luar biasa yang berbentuk *Trans National Corporation* termasuk yang melembaga sebagai Bank Dunia, IMF, ADB dll (Swasono, 2004). Mereka inilah, dengan kekuatan dan *global networks*-nya mencoba menguasai dunia, menyebarkan sistem ekonomi pasar-bebas memakai topeng globalisasi untuk menutupi karakter aslinya selaku kekuatan neoimperialisme dan neoliberalisme, membentuk suatu penjajahan baru terhadap negara-negara lemah-ekonomi dan lemah-politik.

Pasar bukan lagi sekedar "apa", tetapi "siapa", pasar adalah *the global financial tycoons*.

---

<sup>1</sup> Lihat, Martin Wolf, *Why Globalization Works* (New Haven: Yale University Press, 2004), hlm. 13 (mengutip Vargas Llosa).

Paham ekonomi Adam Smith (yang dianut oleh kampus-kampus kita) berdasar falsafah dan titik-tolak liberalisme dan individualisme (*self-interest*). Mekanisme pasar-bebas atau *laissez-faire* dikatakan oleh Adam Smith dioperasikan oleh *an invisible hand* atau suatu tangan tak nampak alias "tangan ajaib", yang bisa mengatur sendiri (*self-regulating*) dan mengkoreksi segala kesalahan mekanisme ekonomi (*self-correcting*) yang serba tahu (*omniscient*) dan serba perkasa (*omnipotent*). Perkataan "invisible-hand" hanya disebut satu kali (pada halaman 527) dalam bukunya setebal 1200 halaman. Kiranya para ekonom Smithian yang berideologi liberalisme dan individualisme sengaja memanfaatkan perkataan "*invisible-hand*" secara berlebihan untuk kepentingan ideologi.

Ternyata selama lebih dari 250 tahun itu *the invisible hand* atau "tangan gaib"-nya Adam Smith tidak pernah muncul dan yang muncul adalah kegagalan-kegagalan pasar atau market-failures. Semula diharapkan yang muncul adalah Ratu Adil, ternyata Durga. Dikira tangan ajaib membawakan keadilan sosial, ternyata menggusur yang lemah dan miskin. Sehingga pada akhirnya muncul tuntutan-tuntutan agar Paham pasar-bebasnya Adam Smith dikoreksi secara mendasar dengan seruan *the end of laissez-faire* atau perlu diakhirinya pasar-bebas. Pasar-bebas melalui *perfectly free-competition* atau persaingan-bebas hanya akan menguntungkan yang kuat dan menggusur atau mematikan yang lemah. Apa yang berlebihan atau keterlaluhan dari paham ini adalah bahwa persaingan-bebas semacam itu justru dianggap akan melahirkan *efficiency* ekonomi yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Mereka yang percaya akan hal ini disebut sebagai kaum fundamentalis pasar. Sangat boleh diperkirakan pandangan kaum fundamentalis pasar ini berdasar pada peradaban kuno yang jahiliah, sangat tidak manusiawi, yang kita kenal dengan *survival of the fittest*, hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup, yang tersisih dan tidak selamat tidak perlu disesali.

Di ruang kelas, para dosen kita yang itu-itu juga dan yang begitu-begitu melulu, dengan kecongkakan dan kelengahan intelektualnya mengajarkan kriteria .pasar persaingan sempurna (*perfectly free-competition*), antara lain berlakunya asumsi *free-entry* dan *free-exit* dengan segala ignoransinya. Tanpa mau tahu bahwa *free-entry* adalah memangsa dan mencaplok (*predatoric* dan *aquisitory*), sedangkan *free-exit* adalah tersisih dan mati gulung tikar. *Ausschaltungstendenz* dan *Einschaltungstendenz* beroperasi secara teoretikal maupun dalam kenyataan. .

Lalu apa itu neoliberalisme? Tidak mudah bagi sekelompok ekonom fundamentalis pasar melepaskan diri dari mitos tangan ajaib (*the invisible-hand*) dan pasar-bebas (*free-market*) senyawanya ini, setiap kali dituntut berakhirnya pasar-bebas (*the end of laissez-faire*), setiap kali pula doktrin fundamentalisme pasar, sebagai cerminan paham individualisme (*self interest*) dan liberalisme, muncul kembali.

Menurut catatan saya sudah lima kali ditegaskan perlunya mengakui *the end of laissez-faire*, berakhirnya fundamentalisme pasar. Pertama kali oleh tokoh. besar John Maynard Keynes (1926); kedua oleh Moh. Hatta, Karl Polanyi (1934 dan 1944); ketiga oleh Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960); dan keempat oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz, Susan George, dll (1990-2002). Intinya adalah bahwa pasar tidaklah *self-regulating*, tidak *self-correcting*, penuh market *failures*, terutama dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Para Nobel laureates 2007 (Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson); 2008 (Paul Krugman); 2009 (Elinor Ostrom dan George Akerlof) barangkali sebagai penegas kelima yang mendukung *the end of laissez-faire*. Sebelum Keynes (1926) tentulah *laissez-faire* telah ditolak oleh Robert Owen, seorang reformis sosial, pendekar sosialisme, tokoh gerakan koperasi Inggris dan oleh Karl Marx dengan *the Communist Manifesto* (1848) dan dengan *Das Kapital*-nya (1867).

Peran pasar memang penting, tetapi harus dikontrol Negara. Stiglitz dan Akerlof (2009) menegaskan bahwa system pasar-bebas perlu diwaspadai, kegagalan pasar yang terlalu sering terjadi, telah menuntut ide-ide INET (*Initiative for New Economic Theory*) seperti yang diajukan George Soros, Stiglitz dan Akerlof.

Bagi saya Pasal 33 UUD 1945 saat ini masuk kawasan INET, maka pasar haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional, bukan sebaliknya negara yang harus ramah dan tunduk kepada pasar atau pun posisi rakyat direduksi dan disubordinasi oleh kepentingan pasar. Pasal 33 UUD 1945 adalah konsepsi Hatta, bukan kiri dan bukan kanan, tetapi jalan lurus sesuai Pancasila. Hal ini konsisten benar dengan konsepsi politik luar negerinya Hatta "bebas-aktif", yang bebas diartikan sebagai tidak mengekor AS ataupun US, dan yang aktif diartikan sebagai secara mandiri menggariskan kebijaksanaan nasionalnya secara lurus sesuai kepentingan nasional.

Globalisasi adalah tempat bersembunyinya fundamentalisme pasar sebagai penjajahan baru, hegemoni dan perampokan oleh kaum pemodal global (*the global financial tycoons*) yang melembaga di sekitar Washington terhadap Negara-negara berkembang. Kita perlu tekun membaca Meier & Stiglitz, *The Frontiers of Development Economics* (2001).

Mengapa tiap kali *the end of laissez-faire* ditegaskan, setiap kali ia muncul kembali? Jawabnya: kapitalisme tidak bisa hidup tanpa *laissez-faire*, kapitalisme tidak bisa hidup tanpa pasar-bebas, ibarat ikan tidak bisa hidup tanpa air. Globalisasi dan pasar-bebas neoliberalistik bawaannya adalah topeng neo-kapitalisme dan neoimperialisme, yang sesuai sifat dasar bawaannya, akan tetap eksploitori, predatori, akuisitori dan rakus. Menolak paham pasar-bebas adalah patriotik terhadap Konstitusi.

Kebangkitan neoliberalisme merupakan suatu perang ide. Perang ide ini barangkali telah mereka "menangkan" untuk sementara, yang membentuk hegemoni kademis<sup>2</sup> dikampus-kampus kita melalui pengajaran ilmu ekonomi neoklasikal (*mainstream neoclassical economics*) dan didukung oleh sumbangan kepustakaan dari lembaga-lembaga neoliberal. Berulangkali hal ini telah saya kemukakan<sup>3</sup>.

Susan George<sup>4</sup> menggambarkan pula betapa sengitnya perang ide itu berjuang keras menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan kapitalisme global, yang dibiayai oleh korporasi-korporasi dan yayasan-yayasannya secara besar-besaran, memasuki dunia kampus dan lembaga-lembaga penelitian terhormat "membeli" para intelektual dan editor-editor majalah terkemuka, mengadakan perdebatan-perdebatan artifisial yang direkayasa dan dimuat di *New York Times*, *Washington Post* dan *Time Magazine*. IMF, The World Bank, WTO ikut dalam perang ide ini, sebagai bagian dari pabrik ideologi neoliberalisme.

Susan George menggambarkan pula bengisnya neo-liberalisme di Amerika Serikat, apalagi terhadap negara-negara berkembang<sup>5</sup> melalui korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional pendukungnya.

Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*", jelas sangat strukturalistik (peka dan menolak akan ketimpangan-ketimpangan struktural ekonomi). Artinya perekonomian (tidak hanya badan usaha koperasi tetapi juga seluruh badan non-koperasi lainnya) secara imperatif harus disusun, tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai kehendak dan perilaku para penguasa pasar. Ketimpangan-ketimpangan antara kaya dan miskin, antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara pengusaha asing dan pengusaha nasional, harus direstruktur dengan campurtangan pemerintah, agar daulat-pasar tidak menggusur daulat-rakyat.

---

<sup>2</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, "Kesadaran Geografi Kita", KOMPAS, 17 April 2006.

<sup>3</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, "Menolak Liberalisme", Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi, FEUI, 18 Februari 2010.

<sup>4</sup> Susan George, op. cit. hlm. 75-101.

<sup>5</sup> Selama dasawarsa 1980-an keluarga Amerika yang berada 10 % dipuncak pendapatannya meningkat rata-rata 16% , yang 5% dipuncak meningkat rata-rata 23%, yang 1% di puncak meningkat 50% (mereka patut berterimakasih kepada Presiden Reagan), yang 80% dibawah tentu kehilangan sesuatu yang tidak sedikit. Pada tahun 1977 keluarga Amerika lapisan puncak 1% memiliki pendapatan rata-rata 65 kali lebih besar dari mereka yang berada di lapisan bawah 10%. Sepuluh tahun kemudian angka ini menjadi 115 kali lebih besar, loc. Cit. (Catatan saya: di Indonesia angka rata-rata itu diperkirakan 350 – 400 kali lebih besar).

Negara harus aktif mengatur dan merombak ketimpangan-ketimpangan struktural, kalau tidak yang kuat menggusur yang lemah..

Sementara itu, seperti telah dikemukakan di atas telah terjadi pula penjajahan kurikulum (*academic hegemony*) terhadap fakultas-fakultas ekonomi kita. Pengajaran Ilmu Ekonomi sebatas neoklasikal yang mengemban sepenuhnya paham liberalism/neoliberalisme dengan pasar-bebas yang menyertainya. Neoliberalisme tidak *pro-job*, tidak *pro-poor*, tidak pula *pro-economic nationalism*. Pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional digusur oleh *supermarkets*, *malls* dan *hypermarkets*, sehingga terjadi eksklusivisme bagi yang kuat dan marginalisasi terhadap yang lemah. Rakyat miskin tergusur, pembangunan rakyat akibatnya tidak *inherent* dengan pemqangunan ekonomi. Bahkan pengajaran Ilmu Ekonomi di ruang-ruang kelas bisa mengalahkan pesan konstitusi, Pasal 27 ayat 2,<sup>6</sup> Pasal 33<sup>7</sup> dan seterusnya diabaikan. Ini adalah hegemoni akademik, yang membelit dosen-dosen kita menjadi *academic followers*, yang mudah kagum pada *mainstream neo-classical* Barat, yang barangkali mengingkari ideologi nasional dan buta perjuangan bangsanya, lalu mewajarkan bahwa kedudukan modal lebih utama dari nasib manusia.

---

<sup>6</sup> Pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

<sup>7</sup> Pasal 33: "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".